

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1995/1996-2002**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



DIAJUKAN OLEH:

HALIDA FIRDIANA
No. Pokok : 049916546

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

SKRIPSI

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1995/1996-2002

DIAJUKAN OLEH :

HALIDA FIRDIANA

No. Pokok : 049916546

TELAH DISETUIJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Prof. Dr. SOEDJONO ABIPRAJA, SE

TANGGAL

2-2-2005

KETUA PROGRAM STUDI,


Dra. Ec. Hj. SRI KUSRENI, MSI

TANGGAL

17-02-2005

Surabaya, 28-10-2009

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji



Abstraksi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut, maka semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Akan tetapi pola hubungan antara Kabupaten Jombang dengan Pemerintah Pusat adalah bersifat Instruktif, yang artinya adalah pola hubungan di mana peranan Pemerintah Pusat dominan dalam bidang keuangan disbanding peranan Pemerintah Daerah. Apabila dilihat dari tingkat kemandirian Kabupaten Jombang tergolong rendah sekali, yaitu dengan tingkat rasio 16,75 %, begitu juga bila digunakan indikator derajat desentralisasi fiskalnya, dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kontribusi PAD dalam penerimaan daerah, yaitu rata-rata sebesar 17,3 % per tahun, demikian pula dengan rata-rata kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) sebesar 11,1 % per tahun.

Kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pada masing-masing daerah adalah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti halnya Kabupaten Jombang, dalam memenuhi penerimaannya masih belum dapat lepas dari peran pemerintah pusat.